

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan yang dimiliki setiap individu dalam rangka bertindak untuk melakukan transaksi perdagangan dipasar. Persaingan usaha diyakini sebagai mekanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Bila persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, yaitu berupa pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar serta dengan kualitas tinggi. Sebaliknya, bila persaingan dibelenggu oleh peraturan-peraturan, atau dihambat oleh perilaku-perilaku usaha tidak sehat dari perilaku pasar, maka akan muncul dampak kerugian pada konsumen.<sup>1</sup>

Hukum persaingan (hukum anti monopoli) diperlukan tidak hanya dalam rangka menjamin kebebasan untuk bertindak seluas mungkin bagi pelaku usaha, tetapi juga menentukan garis pembatas antara pelaksanaan kebebasan pelaku usaha tersebut dengan penyalahgunaan kebebasannya itu (*freedom paradox*). Jadi hukum anti monopoli membangun kerangka kerja dalam upaya mengatur keseimbangan kepentingan diantara para pelaku usaha, juga keseimbangan kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan masyarakat konsumen. Agar hukum anti monopoli dapat tetap terjaga keharmonisan kepentingan diantara pelaku usaha dengan masyarakat,

---

<sup>1</sup> Asma, *analisa putusan kppu tentang tarif kartel sms*, <http://asma1981.blogspot.co.id/2012/02/analisis-putusan-kppu-tentang-tarif.html>, 02 Oktober 2017.

maka hukum anti monopoli harus dapat menjaga efektivitas dari persaingan usaha. Hal ini patut diperhatikan, karena seringkali kebijakan persaingan usaha justru mengancam persaingan dengan aturan-aturan yang membelenggu dan menghambat persaingan. Ancaman persaingan usaha lainnya juga datang dari para pelaku usaha sendiri yang secara sengaja melakukan berbagai strategi bisnis yang menghambat persaingan.<sup>2</sup>

Salah satu ancaman dari pelaku usaha tersebut adalah dengan melakukan praktik kartel. Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Para pelaku usaha ini melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan proses produksi maupun pengaturan wilayah pemasaran produk, sebagai akibat daripada perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen selaku pemakai barang dan jasa juga kepada pemerintah dan terlebih bagi pelaku usaha lainnya yang tidak termasuk dalam *Cartellist*. Padahal kegiatan kartel merupakan sebuah perjanjian yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dan tindakan para pelaku usaha yang melakukan praktik kartel tersebut adalah merupakan tindakan yang melanggar etika dalam kegiatan hukum bisnis.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

Pada tahun 2007, otoritas persaingan Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), melakukan gebrakan fenomenal dengan memutus dua kasus besar. Heboh, karena rezim KPPU menggunakan pendekatan ekonomi dan hukum yang tidak konvensional dalam pembuktiannya. Fenomenal karena menyangkut industri telekomunikasi seluler yang kala itu sedang naik daun, serta menyeret perusahaan-perusahaan besar.<sup>4</sup>

Kasus tersebut adalah Kasus Kartel Tarif SMS yang diputus pada tanggal 17 Juni 2008 dengan dikeluarkannya putusan No.26/KPPU-L/2007 (yang selanjutnya disebut Putusan KPPU). Kasus ini bermula dari laporan Hutchison yang diblokir oleh XL karena tidak melaksanakan Perjanjian Kerjasama Interkoneksi (yang selanjutnya disebut PKS Interkoneksi) serta adanya berbagai keluhan sulitnya pendatang baru, seperti Smart, Hutchinson, NTS-Axis, Bakrie, dan Mobile-8.<sup>5</sup> Dalam kasus tersebut, KPPU menggunakan bukti perjanjian interkoneksi sebagai dasar pembuktian. Perjanjian penetapan harga dalam bentuk tertulis sangat jarang terjadi pada kasus kartel modern. KPPU menyimpulkan telah terdapat kesepakatan tertulis antar operator untuk menetapkan harga SMS off-net pada *range* Rp.250,- hingga Rp.350,- dari periode 2004 hingga April 2008. Lebih lanjut, KPPU juga menyatakan terdapat kerugian konsumen sebesar 2,8 trilyun rupiah, dengan merujuk

---

<sup>4</sup> Lantiko Hikma Suryatama, *SETELAH KARTEL TARIF SMS, WHAT'S NEXT FOR KPPU?*, <https://id.linkedin.com/pulse/setelah-kartel-tarif-sms-whats-next-kppu-lantiko-suryatama>, 02 Oktober 2017.

<sup>5</sup> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst, hal. 171

pada selisih perhitungan tarif SMS pada harga kompetitif yang hanya sebesar Rp.114,-.<sup>6</sup> Dari 9 operator yang diperiksa melanggar pasal 5 Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (yang selanjutnya disebut UU Anti Monopoli) tentang perjanjian penetapan harga, 6 operator dinyatakan bersalah dan 5 operator didenda KPPU menjatuhkan total denda 77 milyar rupiah terhadap 5 operator. Para operator tersebut adalah PT. Excelcomindo Pratama, Tbk., PT. Telekomunikasi Seluler, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., PT. Telekomunikasi Bakrie Telecom, Tbk., PT. Mobile-8 Telecom, Tbk., dan PT. Smart Telecom yang dinyatakan bersalah melanggar pasal 5 UU Anti Monopoli tetapi tidak membayar denda.

Dikarenakan kendala administrasi hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat baru efektif menyidangkan perkara tersebut pada pertengahan tahun 2015. PN Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Robert Siahaan membatalkan Putusan KPPU. Pembatalan Putusan KPPU oleh PN Jakarta Pusat itu dilakukan dengan 2 alasan yaitu KPPU salah dalam menentukan pasar bersangkutan dan KPPU salah dalam menilai tarif SMS yang harus dibayar oleh konsumen. Kemudian, kasasi diajukan oleh KPPU. Pada medio februari 2016, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi KPPU. Putusan Mahkamah Agung menganulir Putusan PN Jakarta Pusat dan menguatkan kembali Putusan KPPU.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

Dari uraian diatas penulis kemudian tertarik untuk mengangkat penulisan hukum tentang dua unsur yang menjadi alasan pembatalan putusan KPPU oleh Pengadilan Jakarta Pusat dalam **“Analisa Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga SMS Antar Operator (Suatu Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 26/KPPU-L/2007 Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/2008/PN.JKT.PST Jo. Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Unsur Pasar Bersangkutan dan Unsur Harga yang Harus dibayar Pada Tiap Putusan:
  - a. Bagaimana KPPU Menentukan Unsur Pasar Bersangkutan dan Unsur Harga yang Harus Dibayar oleh Konsumen Dalam Putusan KPPU Nomor 26/KPPU-L/2007?
  - b. Bagaimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Mempertimbangkan Unsur Pasar Bersangkutan dan Unsur Harga yang Harus Dibayar oleh Konsumen Dalam Putusan Nomor : 03/KPPU/2008/Pn.Jkt.Pst?
  - c. Bagaimana Majelis Hakim Mahkamah Agung Menilai Penerapan Unsur Pasar Bersangkutan Dan Unsur Harga Yang Harus Dibayar Oleh Konsumen Terhadap Keputusan Pengadilan Jakarta Pusat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016?

2. Bagaimana Analisis Unsur Harga Yang Harus Dibayar Dan Unsur Pasar Bersangkutan Dalam Kasus Perjanjian Penetapan Harga Antar Operator SMS?

### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk Mengetahui Unsur-Unsur Perjanjian Penetapan Harga Dalam Kasus Dugaan Perjanjian Penetapan Harga SMS Antar Operator.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan negeri jakarta pusat terhadap unsur-unsur perjanjian penetapan harga dalam Putusan Nomor : 03/KPPU/2008/PN.Jkt.Pst.
3. Untuk Mengetahui Penilaian Mahkamah Agung Dalam Penerapan Pasal 5 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Oleh Pengadilan Jakarta Pusat.

### **D. Kegunaan Penulisan**

1. Memberikan kontribusi dan dapat dijadikan sebagai refrensi keilmuan hukum di bidang hukum anti monopoli dan persaingan usaha.
2. Memberikan manfaat kepada masyarakat luas terutama para pelaku usaha, konsumen, maupun para penegak hukum.

### **E. Metode Penulisan**

Untuk memperoleh data-data yang dihubungkan dengan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

## 1. Metode Pendekatan

Penulisan ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif (*Normatif Legal Research*), yaitu suatu penelitian yang secara deduktif (proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum) dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas. Penelitian hukum secara yuridis maksud penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.<sup>8</sup>

## 2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer : yaitu bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif dalam penelitian ini mengkaji terhadap Putusan KPPU No. 26/KPPU-L/2007, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/2008/PN.JKT.PST, Putusan Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016, dan Undang-Undang No. 05 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

---

<sup>8</sup> LP3M ADIL, “*Tentang Metode Penelitian*”, <http://lp3madilindonesia.blogspot.co.id/2011/01/divinisi-penelitian-metode-dasar.html>, 04 Oktober 2017.

Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berkaitan dengan judul penulis.

- b. Bahan Hukum Sekunder : yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari literatur-literatur, rekaman berita terkait kasus SMS off Net, jurnal, hasil penelitian serta doktrin atau pendapat hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier : yaitu bahan hukum yang berupa kamus (khususnya kamus hukum) dan ensiklopedia.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dipergunakan dalam penulisan ini menggunakan teknik Studi Pustaka (*library research*) dan pencarian bahan hukum melalui *browsing* internet dan membuat deskripsi analisis.

### 4. Teknik Analisa Bahan Hukum

Dalam hal analisa bahan hukum penulis menggunakan teknik analisa isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa.

## F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum tentang **Analisa Perjanjian Penetapan Harga Tarif Sms Antar Operator (Suatu Studi Terhadap Putusan KPPU Nomor : 26/KPPU-L/2007 Jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/KPPU/2008/PN.JKT.PST Jo. Mahkamah Agung Nomor 9 K/Pdt.Sus-KPPU/2016)**, adalah :



### 1. Bab I

Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### 2. Bab II

Dalam bab ini berisi pengertian tentang tinjauan umum dan kajian pustaka mengenai pengertian-pengertian, pendapat para ahli tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan.

### 3. Bab III

Dalam bab ini akan dijabarkan data-data hasil analisa penulisan berkenaan dengan permasalahan yang dimaksud.

### 4. Bab IV

Merupakan bab terakhir atau penutup dalam penulisan skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang berhubungan dengan hal-hal yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya.